BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhan Allah Swt. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mis'aaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Kemudian untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat maupun ketentuan serta tata cara melakukan perkawinan.

Hak dan kewajiban suami dan istri dan berakhirnya perkawinan. Dengan perceraian juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak luar kawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.10.

yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami-istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam.³ Hal ini dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terhadap tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*(Depok: Rajawali Pres,2007), h.117-118.

³Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya,2012), h.406.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmat) antara suami-istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara yang dapat menghalalkan hubungan antar kedua lawan jenis.

Begitu jelas dalam Islam menjelaskan tentang hakikat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas.⁵Maksudnya ketika seseorang hendak ingin menikah maka terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah.Hal ini bertujuan untuk menjaga agar perkawinan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ada dalam agama Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat

⁵Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada MMedia, 2004),h. 144.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Penerbit Graha Media Press, 2014),h.2.

mulia di tengah-tengah makhluk Allah Swt yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah Swt sebagai al-Khaliq.

Bagi umat Islam disyaratkan beberapa hal yang berkenang dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinnan yaitu harus memenuhi syariat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana membangun keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sekralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.⁷

⁷Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*(Yogyakarta: Teras,2001), h.29.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencinta Alam.⁸

Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fiqh dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambali, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. Untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zina tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain.⁹

⁸Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 13.

⁹Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukum Positif*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-)Ta'lim Vol. 15 No.1- 2017, h. 30-31.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks diantaranya kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Hamil di luar nikah termasuk kategori zina dalam Islam merupakan sesuatu hal yang sangat tabu di Indonesia. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi, maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Fenomena yang terjadi ketika seseorang hamil di luar nikah, orang tersebut akan dikucilkan dan menjadi bahan pergunjangan di masyarakat karena telah melanggar norma sosial yang berlaku. Maka untuk menutupi aib keluarga, pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah untuk melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.¹⁰

Sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

¹⁰Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Bahaya Zina*, (Jakarta: Makta Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah,2008), h. 50-51.

¹¹Okfita Sari, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah,2018),h. 6.

Pergaulan bebas di Desa Padakkalawa sudah menjadi hal yang tidak asing di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah maraknya gaya berpacaran remaja di Desa Padakkalawa. Gaya berpacaran mereka menjurus ke pergaulan bebas karena pasangan remaja tidak lagi malu berboncengan dengan mesra di depan umum, dan tempat yang bisa digunakan untuk berpacaran adalah tempat yang sepi dan yang paling favorit di kalangan remaja adalah kos-kosan disana mereka bisa bercumbu meraba dan berciuman, tak hanya tempat sepi, biasanya mereka berpacaran di kos-kosan hingga tengah malam dikarenakan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya.

Kasus yang saya alami ini adalah kasus yang sangat membuat keluarga saya malu dan saya sadari itu, tetapi saya mengambil jalan seperti ini karena akibat gaya berpacaran saya melampaui batas, kemudian dulu saya tidak diizinkan oleh orang tua saya, lalu saya melakukan hal yang tidak sepatutnya saya lakukan tetapi awalnya saya hanya penasaran dan ingin mencoba dan akhirnya saya menjadi ketagihan karena nafsu sehingga membuat saya menjadi hamil tanpa pernikahan.¹²

Fenomena seperti di atas tentunya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang serius bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat secara umum. Kebebasan media dalam mengekspos tayangan-tayangan khusus dewasa ikut berperan serta menjadi pemicu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas menjadi penyebab bagi tingginya angka kehamilan remaja. Hamil diluar nikah tidak lain karena faktor berpacaran, serta peran orang lepas pengawasan sehingga anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dari berpacaran. Dan dalam peraturan masyarakat tidak ada larangan bertamu sampai jam yang ditentukan jadi banyak sekali anak muda yang pacarnya masih di rumah sampai tengah malam, dan itu tidak ada teguran baik dari warga setempat, karena kebebasan ini

¹²Hasmiah(30th), Penjahit (korban) diwawancarai oleh peneliti di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ,03 Februari 2020

banyak pasangan kekasih yang pacaran di rumah melewati batas sehingga menimbulkan hal yang negatif terjadi. Hal tersebut menyebabkan banyak pasangan kekasih yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah.

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qabul.¹³

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara), selain adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.¹⁴

Menurut *Ensiklopedihukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Dasar hukum larangan zina terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinahan, serta

¹³Rusdaya Basri, *FiqhMunakahat4MazhabdanKebijakanPemerinta* , Cet.1, (Pare-Pare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER,2019) h. 312.

¹⁴Diana Putri A, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah*, "(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Surakarta, 2017), h. 2-3.

hukuman yang secara pasti (*qath'i*) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah Swt,maupun dalam hadis Rasulullah Saw sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “ Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)” dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa?
- 1.2.2 Faktor apa yang menyebabkan perkawinan hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa?
- 1.2.3 Bagaimana usaha yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa.
- 1.3.2 Mengetahui faktor penyebab hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa.
- 1.3.3 Mengetahui usaha-usaha dalam mengantisipasi perkawinan hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa.

¹⁵Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana,2010), h. 119-122.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sejarah kebudayaan Islam. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang perkembangan budaya yang ada di Kabupaten Pinrang khususnya.

1.4.2 Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kabupaten Pinrang pada khususnya, hasilnya juga dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk menarik minat wisatawan dengan memperkenalkan salah satu budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini.